



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu Rapat : Pukul 13.16 s.d. 14.30 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Ketua/F-PG)
- Acara Rapat : 1. Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN T.A. 2025;
2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; dan
3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 22 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
A. ANGGOTA DPR RI
PIMPINAN:
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6 orang Anggota dari 11 Anggota:
1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
2. Riyanta, S.H.
3. H. Heru Sudjatmoko
4. Drs. Cornelis, M.H.
5. Ir. Hugua

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
 2. Drs. H. Riswan Tony D. K.
 3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M. H., M. Kn.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
 2. Drs. Difriadi
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.
 3. Kamran Muchtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Reza Oktoberia, S.H.
 2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
 3. H. Mohammad Muraz, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
0 orang Anggota dari 4 Anggota:
-
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
2 orang Anggota dari 2 Anggota:
 1. Dra. Hj. Munawaroh

B. UNDANGAN

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI
(Mayor Inf. (Purn.) H. Agus Harimurti Yudhoyono,
M.Sc., M.P.A., M.A.)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Baik. Bisa kita mulai?

Ibu Rezka? Pak Wahyu? Pak Muraz? Oh, sedang salat ya.

Pak Zul, kalau Pak Menteri rapat di sini baru beliau hadir. Ini laporan kepada Pak Ketua Umum. Artinya, Pak Zul sangat cinta dan sayang dengan Pak Ketua Umum ya, Pak Zul? Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita mulai. Rapat sesungguhnya hari ini kita ada dua mata acara rapat:

- Yang pertama, bidang anggaran;
- Yang kedua, bidang pengawasan.

Atas seizin forum ini, saya minta persetujuan. Berkenan kita satukan saja antara anggaran dengan pengawasan? *Nah*, di dalam anggaran ini berkenan Anggota tidak, bukan tidak ya, walaupun melakukan pendalaman nanti bisa di bidang pengawasan biar kita bisa cepat.

Saya kira setuju ya, Kawan-Kawan? Setuju, ya? Jadi, enggak ada interupsi lagi, Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera kepada kita semua,

Shalom,

**Yang terhormat saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
beserta jajarannya,**

Yang terhormat Anggota Komisi II DPR RI,

Yang kami muliakan Hadirin yang hadir pada hari ini,

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan pujian syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas perkenan-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Pada rapat hari ini dihadiri juga oleh para Kakanwil dan Kakantasa se-Indonesia secara virtual dan mengikuti rapat ini.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat pada hari ini dalam daftar hadir telah ditangani oleh 36 dari 99, dari 49 Anggota terdiri dari 9 Fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat

(1) Peraturan Tata Tertib DPR RI maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.16 WIB)

Sesuai jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI telah menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan RKP-KL Tahun 2025 yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja menyangkut anggaran dan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Jam di ruang ini menunjukkan pukul 13.16. Maka, saya minta persetujuan rapat ini kita akhiri pada pukul, pukul berapa Pak Gaus? 14.30. Ibu Reska? Pak Hugua dari PDI Perjuangan? Pak Ongku dari Partai Demokrat? Jam 14.30.

Jadi, dua mata acara ini kita akhiri jam 14.30 karena Wakil Ketua IKN akan ke IKN jam 17.00. Kan begitu, Pak? Jam 17.00. Yang pasti beliau tidak naik *private jet*, Ibu Reska, ya. Jadi, kita akhiri pukul 14.30.

(RAPAT: SETUJU)

Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024, dan acara Rapat Kerja menyangkut Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanahan, dan lain-lain.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada saudara Menteri ATR/BPN menyampaikan penjelasan menyangkut bidang anggaran.

Silakan, Saudara Menteri.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

**Yang kami muliakan Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Junimart Girsang,
Yang kami hormati para Anggota Komisi II DPR RI yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu,**

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menyelenggarakan Rapat Kerja pada siang hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Ini adalah media terbaik untuk melaporkan kerja dan kinerja kita, baik eksekutif maupun legislatif kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Para Wakil Rakyat atas undangannya di mimbar yang terhormat ini. Semoga forum ini dapat menghadirkan gagasan, pemikiran, serta solusi terbaik atas berbagai isu dan tantangan.

Sesuai dengan undangan, berdasarkan surat Nomor B dan seterusnya tahun 2024 tanggal 20 Mei, kita akan membahas sejumlah agenda, yaitu:

- target dan capaian anggaran Tahun Anggaran 2023; kemudian
- yang kedua, target dan capaian Tahun Anggaran 2024; dan
- yang ketiga, pagu indikatif Tahun Anggaran 2025.

Izinkan kami untuk melaporkan terlebih dahulu Capaian Kinerja Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Fisik Tahun 2023.

Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp8.072.163.385.000,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp7.874.964.280.962,00 atau sebesar 97,56%. Sedangkan dari Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), *alhamdulillah*, capaian tahun 2023 melampaui target dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,5 triliun. Realisasinya mencapai 121,8% atau sebesar Rp3,05 triliun.

Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2023 Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan sepuluh program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional. Dari 10 program dan kegiatan itu, 3 program sesuai dengan target, antara lain:

- Akses *reform*, realisasinya 100%;
- Peta zona nilai tambah, realisasinya 100%; dan
- Data tanah ulayat, realisasinya juga 100%.

Kemudian ada 5 program yang melampaui target, yakni:

- Dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten dan kota, realisasinya 116,98%;
- Peta tematik pertanahan dan ruang, realisasinya 143,29%;
- Peta bidang tanah PTSL, realisasinya 101,87%,
- Data dan informasi P4T (Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah), realisasinya 100,16%; serta

- Penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan, realisasinya 120,32%.

Bapak/Ibu yang kami muliakan,

Setelah tadi kami sampaikan capaian tahun 2023, maka selanjutnya kami akan melaporkan Capaian Kinerja Realisasi Pelaksanaan Anggaran.

Saya ulangi, saya, mohon maaf saya ada yang terlewat.

Ada dua program yang hampir mencapai target, yaitu:

- SK redistribusi, realisasinya 98,15%; dan
- Sertifikat hak atas tanah PTSL, realisasinya 96,24%.

Izinkan kami untuk melanjutkan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Fisik Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tahun ini.

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.670.171.296.000,00. Adapun capaian realisasi anggarannya sebesar Rp2.379.881.308.201,00 atau sebesar 31,28%.

Sebagai perbandingan, capaian bulan Januari hingga Mei tahun 2023 yang lalu adalah sebesar 29,26%. Artinya, kondisi tahun ini, *insya Allah*, lebih baik dari tahun lalu. Bahkan realisasi hingga minggu kedua Juni ini sudah mencapai 36,3%.

Adapun pelaksanaan sepuluh program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional realisasinya terus mengalami kemajuan. Bahkan sudah ada yang mencapai 51,89%. Kecuali untuk data tanah ulayat, realisasinya masih dalam proses karena pelaksanaannya masih membutuhkan waktu berkaitan dengan pihak-pihak di luar Kementerian ATR/BPN.

Kemudian sejalan dengan program PTSL pada tahun 2024 ini, kami menargetkan 104 kabupaten dan kota lengkap. Realisasinya hingga saat ini sudah mencapai 33 kabupaten/kota lengkap atau sebesar 31,73%.

Bapak/Ibu yang kami muliakan,

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Sesuai dengan surat bersama pagu indikatif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S/34 sekian, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen sekitar Rp4,27 triliun;

- Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar Rp2,03 triliun; dan
- Program penyelenggaraan penataan ruang sekitar Rp143 miliar.

Adapun sumber dananya terdiri dari:

- Rupiah murni sebesar Rp 4,53 mil, triliun; dan
- Penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,92 Triliun Rupiah.

Anggaran ini belum termasuk tambahan anggaran berupa pinjaman dari Bank Dunia yang saat ini kami sedang dalam proses negosiasi untuk penambahan pinjaman 5 tahun berikutnya.

Jika dirincikan per-Eselon I dapat disampaikan sebagai berikut:

- Untuk Sekretariat Jenderal sekitar Rp4,15 triliun;
- Inspektorat Jenderal sekitar Rp28,53 miliar;
- Ditjen Tata Ruang sekitar Rp143,34 miliar;
- Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sekitar Rp1,02 triliun;
- Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sekitar Rp651,70 miliar;
- Ditjen Penataan Agraria sekitar Rp218,60 miliar;
- Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sekitar Rp54,44 miliar;.
- Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sekitar Rp78,32 miliar; dan
- Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sekitar Rp104,88 miliar.

Total keseluruhan sekitar Rp 6,45 triliun.

Dari jumlah total itu, pagu indikatif untuk belanja operasional sekitar Rp3,785 triliun. Dan untuk belanja *non*-operasional sekitar Rp2,668 triliun. Belanja operasional digunakan untuk gaji, tunjangan, kebutuhan operasional, pemeliharaan kantor, dan lain-lain.

Sedangkan, belanja *non*-operasional digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan *output* utama yang telah ditetapkan.

**Yang kami muliakan Pimpinan, dan
Segecap Anggota Komisi II DPR RI,**

Pada kesempatan ini, kami perlu laporkan juga Rancangan Program dan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025 yang merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Adapun prioritas kegiatannya sebagai berikut:

1. Digitalisasi data pertanahan mencakup layanan elektronik dan sertifikat elektronik;

2. Akselerasi pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL);
3. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat reforma agraria yang terdiri dari aset *reform* atau redistribusi tanah dan akses *reform* yang merupakan *major project* dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
4. Pengadaan tanah dan, saya ulangi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara;
5. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas;
6. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
7. *Project integrated land administration and special planning*;
8. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
9. Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan difokuskan pada:
 - penguatan kelembagaan;
 - penerapan *human capital management*;
 - penguatan kerangka regulasi;
 - tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; serta
 - penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi.

Insya Allah, kami berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN meskipun dengan ketersediaan pagu anggaran sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas.

Yang kami hormati dan muliakan Pimpinan, dan Segenap Anggota Komisi II DPR RI,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Kerja hari ini.

Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, serta rencana Tahun Anggaran 2025 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang kami muliakan Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI.

Kita berharap apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh Bapak/Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Saudara Menteri.

Saya tadi kelewatan. Selamat kepada Dirjen Tata Ruang yang baru.

Mana beliau?

Bapak/Ibu sekalian,

Ini Dirjen Tata Ruang baru, Saudara Dwi Hariawan ya, menggantikan Pak, apa, Saudara Gabriel.

Harapan kami dari Komisi II dengan dilantiknya Pak Dirjen Dwi Hariawan maka percepatan penyelesaian rencana detail tata ruang, ya Pak ya, bisa mencapai target 2000 RDTR. Catatan saya masih 500 sekian RDTR-nya itu, ini ada di pundak Pak Dwi Hariawan nanti. Ya, Pak. Ini amanah Pak, sekaligus ibadah. Kalau bisa sampai 2.000 Pak ya. Dan inovasi layanan elektronik juga semakin bisa berkembang melalui RDTR.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Ini menyangkut anggaran, kita hanya menerima laporan. Enggak tahu saya, tadi *nyimak* ada enggak permintaan penambahan dari Kementerian ATR untuk anggaran. *Nah*, setelah ini nanti kita masih akan melakukan pembahasan terhadap anggaran dari mitra kita, ATR/BPN.

Nah, saya menyampaikan kepada kawan-kawan Komisi II. Apakah ada yang harus didalami dengan paparan dari saudara Menteri ATR/BPN tadi?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Untuk anggaran, Pak?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak Gaus saja ya. Cukup ya.

Nanti, nanti kalau pendalaman, Pak. Kita lanjut *nih*. Nah, ini menyangkut anggaran saja, ya. Kalau Pak Ongku, nanti saja, Pak. Saya berani meng-*cut* Pak Ongku di rapat ini.

Silakan, Pak Gaus.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri ATR/BPN beserta seluruh jajaran,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Saya merasa rugi kiranya kalau tidak menyikapi progres *report* yang disampaikan oleh Pak Menteri yang sangat luar biasa ini. Tentu, saya akan memberikan beberapa komentar berkaitan terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga sudah saya coret-corek terhadap kertas kerja yang Bapak berikan kepada kami.

Pertama adalah tentang realisasi anggaran 2023. Capaian anggaran persentasenya adalah 97,56%. Kita melakukan RDP berkaitan terhadap Evaluasi dan Rencana Anggaran 2025 ini adalah merupakan hari kedua. Tadi dengan Mensetneg, Mensekap, KSP, BPIP. Kemarin Menteri Dalam Negeri, IKN, IKN. Dan terakhir pada hari ini dan, *insya Allah*, besok akan berlanjut.

Saya catat itu realisasi-realisasi yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga itu. Rapor yang dari bapak ini saya lihat sangat luar biasa. Capaiannya tidak seperti yang lain, yang malah ada yang 86 koma sekian persen.

Oleh karena itu, yang 86,36% itu adalah Bawaslu. Anggarannya 9,9%. Artinya, ada dana yang tidak terealisasi lebih 1 T. Berita saya hari ini menyikapi tentang hal tersebut. Artinya adalah sia-sia kiranya kalau kita tidak mampu melakukan maksimalisasi terhadap pemakaian anggaran. Inilah yang saya maksud.

Kementerian Dalam Negeri 97,25%. IKN 95%. Berarti masih baik. Kemudian, KPU 96% sebagai bandingan bagi Pak Menteri. Bawaslu sebagaimana saya katakan tadi 86%. Mensekab, luar biasa, 98%. Kemudian, Mensekneg adalah 97%. Kemudian, BPIP adalah 96%. KSP 98%. Dari semua anggaran itu ATR/BPN adalah pemakaian anggaran termasuk besar bagi kami Komisi II sebagai mitra. Karena, ATR/BPN sifatnya adalah vertikal.

Ini manakala dibandingkan dengan yang lain Bapak ini *surprise*, mampu memenit Kakan-kakan, Kanwil-kanwil. Sebab, anggaran itu tidak hanya terpusat di Kementerian. Tetapi, bagaimana hal ini dipicu dan dipacu Kakan-

kakan itu. Inilah yang saya lihat beda tadi 97. Tapi, di rata-rata peringkat ATR/BPN sangat luar biasa. Itu yang pertama saya berikan apresiasi.

Tentu saya berpesan, bagaimana ke depan ini bisa dipertahankan kalau dapat ditingkatkan. Itu pesan saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian Bapak Menteri.

Yang juga luar biasa adalah tentang capaian sepuluh program. Rata-rata 100%, ada yang malah lebih. Yang di bawah 100% hanya dua item yaitu tentang sertifikasi hak atas tanah PTSL dan redistribusi yaitu 88,15%. Di atasnya adalah lebih. Ada yang 143%, 101%, 116%, 120%.

Tentu saya juga memberikan masukan terhadap hal ini. Capaian itu hendaknya cuma 100%, tidak boleh lebih. Kalau berlebih, bisa saja bawahan Pak Menteri target yang di capaian itu memang diproyeksikan 100% lalu dikurangi supaya ada lompatan.

Yang ingin pesan saya adalah perencanaan terhadap rencana capaian ini tentu yang pas itu adalah 100. Kalau 100 lebih, tentu dipertanyakan perencanaan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Walaupun, ini bisa kita diskusikan terhadap persoalan apa yang saya ungkapkan.

Berikutnya adalah tentang anggaran 2024. Tadi juga indikatornya sangat luar biasa. Bisa dijadikan *sample* ketika pemakaian anggaran. Pada tahun anggaran berjalan di tahun 2023 hanya 29,86 *sample*-nya. Hari ini capaiannya, pada tahun anggaran sampai dengan bulan Juni pada tahun dan bulan yang sama, ada peningkatan. Ini sangat luar biasa.

Dan kami tadi, dan saya pribadi, juga menyikapi kepada kementerian/lembaga yang lain. Saya minta agar bagaimana, bagaimana capaian realisasi anggaran 2024 itu jangan di akhir anggaran tergopoh-gopoh. Jadi, karena ingin mencapai 100 atau 97% realisasinya jangan di akhir tahun anggaran. Kalau dapat dari sekarang, itu sudah mulai dilakukan langkah-langkah sesuai dengan perencanaan yang Bapak lakukan.

Tentu ini akan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi. Bagaimanapun serapan anggaran tentu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu, ini saya harapkan bisa menjadi catatan penting bagi Pak Menteri dalam merealisasikan anggaran tersebut.

Kemudian, yang berikutnya adalah tadi memang ada target-target program di tahun 2024 itu ada 0,8%. Ini memang tidak bisa berbanding lurus, harus sama dengan bulan Juni pada hari ini capainya sekian. Ada pembenahan-pembenahan yang Bapak lakukan.

Mudah-mudahan pembenahan, perencanaan, dan lain sebagainya itu jangan nanti sebagaimana realisasi anggaran yang saya sampaikan. Juga karena mencapai target lalu realisasi terhadap program itu tidak maksimal. Artinya, yang saya ingin katakan adalah kualitas, kuantitas harus berbarengan terhadap apa yang ingin dicapai oleh kementerian ini.

Terakhir adalah anggaran yang Bapak sampaikan pada kami untuk tahun anggaran 2025 adalah 6,454 T. Saya hitung-hitung itu turun 20% dari tahun 2023.

Saya selalu menyampaikan kepada Pak Soyan Jalil, kepada Pak Hadi Cahyanto, bagaimana ini adalah program PTSL. Ini adalah program prioritasnya Pak Jokowi sebagai Presiden. Memang capaian anggaran, anggarannya tadi sudah lebih dari 100%, tetapi anggarannya turun 20%.

Menurut hemat saya itu, itu adalah sesuatu menjadi persoalan bagi kementerian ataupun lembaga apa pun. Apalagi di Kementerian ATR/BPN yang nilainya adalah 8 T ketika 2023. Hari ini yang direkomendasikan oleh Bappenas bersama Menteri Keuangan cuma 6,4 T itu, bagaimana Bapak bisa menyiasati kekurangan yang 20% itu, menurut hemat saya, sangat fantastis. Harusnya anggaran ini makin lama makin naik. Apalagi di tahun 2023 itu baru pulih pandemi *covid*. Sekarang ini tidak ada alasan untuk melakukan pengurangan.

Oleh karena itu, tadi sebagaimana dikatakan oleh Pimpinan, Pak Menteri tidak meminta adanya tambahan anggaran untuk tahun 2025. Kenapa itu tidak dilakukan? Paling tidak kalaulah seandainya Pak Menteri meminta ada tambahan kepada kami, tentu ini juga merupakan kesimpulan rapat nanti untuk bisa juga dibawa ke Badan Anggaran. Sehingga, mendapatkan keleluasaan Pak Menteri dalam *me-manage* apa yang Bapak Menteri pimpin terhadap kementerian ini.

Ini adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau bisa disebutkan berapa lagi yang diperlukan anggaran itu. Sehingga, ini menjadi kesimpulan, tentu sesuatu yang sangat luar biasa pula dan menjadi *legacy* bagi kami Komisi II. Karena, pembahasan anggaran selama periode kami ini bukan makin lama akan makin turun. *Insy Allah*, ada peningkatan kembali terhadap apa yang pernah dicapai oleh Kementerian ATR/BPN ini.

Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Gaus.

F-P.NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Ya, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,*

Salam Pancasila!

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Interupsi, Pimpinan. Interupsi sebelum mulai.

Pimpinan, menurut saya kan anggaran dengan evaluasi ini hampir *nyambung* ini. jadi, satu kali *session* saja. Karena kalau dua kali, nanti dua pertanyaan bisa dilakukan.

Jadi, kita persilakan Pak Menteri dulu sampaikan evaluasinya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Enggak. Begini, Pak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Paparannya satu kali jalan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, siap.

Terima kasih, Pak Hugua.

Ini kan dua mata acara yang berbeda. Tapi, satu untuk semua, semua untuk satu, Pak. Dan ini masing-masing punya kesimpulan. Jadi, enggak bisa disatukan.

Silakan, Pak. Ini menyangkut anggaran Pak, bukan kinerja Pak, ya.

F-P.NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Bukan. Capai kalau kinerja.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Silakan Pak, silakan.

F-P.NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Yang terhormat Pimpinan,

**Pak Menteri,
Pak Wamen, dan
Seluruh jajaran,**

Dengan Pak Menteri yang baru, ini *trust* kan lagi bagus. Kita semua paham tanah ini masalahnya banyak. Tapi, begitu saya lihat pagu indikatif ini di luar kebiasaan, Pak Menteri. Biasanya, pagu indikatif untuk tahun anggaran baru itu tahun yang sedang berjalan. Tapi, ini justru selisihnya 1T lebih.

Ini akan membuat Pak Menteri tidak enak membawa ini, men-*deliver* ini. Sementara, kan kita tahu yang baru juga dipersoalkan IKN juga, Pak Menteri. Itu saja tidak gampang menyelesaikannya. Tetapi, ini malah selisihnya jadi, ya, kurang lebih turun 20%, Pak Gaus. Dan ini tidak fleksibel untuk Pak Menteri mengambil semua keputusan di daerah itu ada masalahnya.

Oleh sebab itu, walaupun karena tidak, Undang-Undang tidak membolehkan kami membahas sampai satuan tiga. Tetapi, nanti di dalam pendalaman paling tidak diberi kisi-kisinya dan supaya anggaran ini tidak seperti ini. Ini membahayakan instansi Pak Menteri ini.

Mungkin itu saja. Jadi, terkait dengan itu. Kalau kinerja, kan semua bagus, ya.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

*Shalom.
Waalaikumsalam.*

Silakan, Pak Agung.

F-P.GOLKAR (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya sama dengan Pak Daus, Pak Gaus. Pertama-tama saya memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan barusan oleh Pak Menteri. Luar biasa ini ya. Prestasi yang sangat gemilang yang kita harus apresiasi dengan baik.

Yang penting saya sampaikan dengan jabatan Pak Menteri yang belum begitu lama namun prestasi sudah gemilang. Ini sudah tentunya tidak terlepas dari dukungan SDM yang memadai. Oleh sebab itu, yang perlu saya

sampaikan pada kesempatan ini adalah saya yakin Pak Menteri belum mengetahui kondisi kantor dari seluruh Kakantah yang ada di Indonesia ini.

Dari fungsi pengawasan yang saya laksanakan di NTB, NTT, dan Bali, sebagai tempat tinggal saya, dan Bali sebagai daerah kunjungan pariwisata, ini banyak sekali kantor-kantor yang belum representatif untuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan ini di samping SDM yang mumpuni, ini merupakan salah satu sarana di dalam menunjang bagaimana kinerja itu bisa dicapai.

Dan saya berharap Pak Menteri pada, apa, pada kabinet mendatang saya berharap Pak Menteri tetap di sini. Sehingga, bisa dilanjutkan dan membangun *legacy*, yaitu pentingnya pembangunan dan perbaikan kantor-kantor Kakantah kita.

Ini sangat penting, Pak. Kalau kita melihat dari sisi akuntan publik nilai ekonomis dari kantor yang ada di Kakantah kita sudah lewat nilai ekonomisnya. Dan jangan sampai nanti SDM yang sudah bagus yang kemudian karena nilai ekonomis kantornya sudah tidak memadai, terjadi musibah di situ. *Nah*, inilah yang kita tidak inginkan dari sisi anggaran.

Pimpinan dan Anggota seluruhnya,

Saya *concern*. Penting Pak Menteri membuat satu anggaran terkait dengan pembangunan atau rehab kantor.

Sekian yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan ini juga Pimpinan, mudah-mudahan di bulan Juli kita bisa komplit di Bali dan di sini kita bisa rancang. Saya mohon kehadiran Pak Menteri sebagai ajang kita mengevaluasi kegiatan kita dan merancang apa yang sekiranya akan kita buat ke depan.

Sekian, Pimpinan.

Terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya. Terima kasih, Pak Agung.

Masih ada? Ini mau apresiasi atau mau itu, Pak? Ya, silakan.

Silakan, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih.

Ini Ketua saya ini agak-agak usil juga. Sedikit-sedikit jahil, tapi baik dia. Baik beliau ini. Cuma dia *ngerjain* dulu, di-*bully* dulu begitu.

**Yang terhormat Pimpinan,
Pak Menteri,
Wakil Menteri,
Pak Dirjen,
Sekjen, dan
Seluruh jajaran,
Kawan-kawan Komisi II yang saya hormati, beserta
Seluruh Kanwil, Kantah yang hadir melalui zoom pada rapat kita sore hari
ini yang saya hormati,**

Mencermati anggaran yang dipaparkan oleh Pak Menteri, baik dari 2023 sampai 2024 dan pagu indikatif 2025, saya ada keprihatinan *nih*, Pak Menteri. Ini kelihatannya anggarannya turun terus. Dari 2023 ke 2024 turun 5,7%. 2024 ke pagu indikatif 2025 turun lagi, ini lebih fantastis lagi turunnya 15,7%.

Ini saya kira, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bagus tadi dan juga Pak Kamran, pokoknya yang penting itu, ya. Bahwa ini adalah Kementerian yang sangat strategis. Gebrakan Pak Menteri dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup terlihat. Akan tetapi, kelihatannya ini kok malah akan direm atau terem dengan sendirinya di 2025 kalau anggarannya posturnya seperti ini.

Di lapangan Pak Menteri, sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan yang sebelumnya juga, saya lihat masih banyak perlu dukungan. Yang pertama adalah dukungan tentang perkantoran. Ada banyak daerah yang kantornya sama sekali tidak ada, Pak Menteri. Di Dapil saya ada beberapa kantor yang tidak ada sama sekali, ya. Belum lagi kalau kita bicara adanya pemekaran-pemekaran wilayah sehingga kantor pertanahannya pun selayaknya dimekarkan juga. Karena, pusat pelayanannya itu jauh, ya.

Di daerah saya itu masih belum dimekarkan. Ya, mungkin Pak Kanwil Sumut ada di sini, Pak Kanwil, Pak Askani ya. Itu Padang Lawas itu masih perwakilan. Padang Lawas Utara malah sama sekali belum ada. Kantor perwakilan pun belum ada dan dia masih menginduk ke Tapanuli Selatan. *Nah*, ini jaraknya jauh sehingga menghambat pelaksanaan program-program Pak Menteri.

Oleh karena itu, saya juga sepakat dengan Pak Bagus bahwa Pak Menteri dan kawan-kawan tolong diusulkan juga, dimasukkan, untuk pembangunan kantor-kantor dan pemekaran kantor-kantor.

Yang kedua, saya juga melihat kurangnya sarana prasarana yang mereka miliki yang baik. Antara lain adalah alat pengukuran, Pak Menteri. Masih banyak yang masih mengukur dengan cara yang konvensional. Ya, ini juga masih sangat kurang.

Berkebetulan hari ini saya meminta tolong salah satu Kantah untuk mengukur di daerah tertentu di daerah Dapil saya. Juga sama karena mereka kurang peralatan bahkan tidak ada kendaraan, mereka meminta supaya kepala desa menyediakan kendaraan menjemput mereka. Ini sangat memprihatinkan.

Saya pikir, minta tolong Pak Menteri, supaya pelaksanaan tugas-tugas ini bisa lebih lancar dan masyarakat terlayani dengan baik, dimasukkan saja, Pak.

Memang seperti kata beliau tadi, kita tidak masuk ke detail-detail penganggaran itu. Tetapi, kami mengusulkan supaya ini kita harus dukung. Kawan-kawan di lapangan ini, Kantah-kantah ini harus didukung. Kendaraannya, kendaraan operasional mereka butuh. Di beberapa tempat harus, istilahnya, *four-wheels drive double cabin* supaya mereka bisa mengakses ke daerah-daerah terpencil. Demikian juga alat-alat pengukuran, baik itu yang berupa *drone* maupun yang berupa GPS, ya. Jangan lagi pakai yang konvensional *land, land* apa namanya, apa pengukuran darat itu ya, Memang itu perlu, tetapi ya untuk yang besar kan bisa pakai *drone* dan bisa pakai yang lebih canggih lagi.

Saya kira kami dari Komisi II, sebagaimana Pak Gaus mengatakan, justru biasanya Kementerian yang lain itu selalu ada usulan, Pak, tambahan dari pagu indikatif. Ini kami tidak belum lihat di sini. Mungkin Pak Menteri ya, enggak usah ragu-ragu untuk tetap meminta adanya usulan tambahan daripada, apa namanya, anggaran ini ya.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, prinsipnya adalah saya di sini tidak membedah anggaran ini secara detail. Tetapi, adalah melihat kondisi di lapangan seyogyanya untuk mendukung kelancaran kegiatan ini ke depan. Apalagi, percepatan ini kita perlu lakukan. Jutaan persil lahan yang masih harus disertifikasi melalui PTSL dan sebagainya. Maka, tentu kita juga berharap ini berjalan lancar, Pak Menteri.

Kami dari Komisi II mendukung atas pengusulan anggaran tambahan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Ongku.

Saudara Menteri, ini masukan dari Pak Ongku sesungguhnya menjadi tanggung jawab para Kakanwil, para Kakantah, bagaimana, apa namanya, melakukan pengadaan tanah, pengadaan kantor. Ini, ini kan masalah koordinasi komunikasi kepada para kepala daerah sesungguhnya. Seperti di Dairi itu, kampung saya, itu bantuan dari Pemkab. Di kunjungan Batubara ya, di Kisaran, Pemkab juga.

Jadi, mungkin nanti melalui Pak Sekjen bisa mengarahkan ke para Kakanwil, Kakantah untuk membangun koordinasi, komunikasi kepada para kepala daerah masing-masing. Karena, kan BPN ini menjadi, apa namanya,

badan yang vital dan fatal untuk sertifikasi tanah-tanah. Termasuk aset pemerintah di sana, Pak Menteri.

Jadi, kalau disebutkan Pak Ongku anggaran untuk pembangunan kantor atau badan tanah, ini masalah komunikasi. Tapi, kalau untuk mobil mungkin ya, Pak Ongku. Untuk mobil, *transport*, mungkin ya.

Tetapi, saya sampaikan kepada Pak Menteri. Ya, ini kan kita membahas mengenai anggaran, Pak. Anggaran saya bolak-balik, bolak-balik enggak ada penambahan Pak di sini. Tetapi, yang ada saya baca program, program itu misalnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan ada skala prioritas digitalisasi dan pertanahan, yaitu layanan elektronik dan sertifikat elektronik. Ini kan tentu memerlukan anggaran yang banyak, Pak. Tetapi, enggak masuk di sini. Enggak masuk, Pak. Bagaimana bisa berjalan?

Layanan ini ada juga biaya implementasinya nanti, Pak. Tentu ada biaya implementasi, ya. Implementasi sertifikat tanah elektronik memerlukan investasi awal. Ini wajib harus ada, Pak. Investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan. Tentu kan harus ada pelatihan Pak, ini. Kan tidak mungkin kita pergunakan IT elektronik tanpa ada pelatihan. *Nah*, dari mana anggarannya ini, Saudara Menteri?

Mumpung sekarang kita membahas anggaran, saya kira masih ada waktu untuk itu nanti disusulkan kepada sekretariat mengenai ini. Karena kalau masalah anggaran terlewatkan, maka biaya implementasi menjadi hambatan utama nanti, Pak, dalam menjalankan program-program di Kementerian ATR untuk layanan elektronik dan sertifikat elektronik. Saya kira ini paling pokok, Pak, ya.

Belum lagi saya paling getol bicara masalah hukum. Enggak naik juga Pak, di sini. Enggak ada masukan, ya. Bagaimana anggaran untuk bantuan hukum khusus untuk internal.

Bagaimana caranya nanti agar BPN menghadapi sengketa-sengketa panggilan dari pengadilan, belum dari kepolisian, dari kejaksaan. Walaupun ada Pak Widodo di sini, Jenderal kita, tapi kan beliau tidak mungkin mampu, iya kan, tanpa diberikan logistik yang sehat. Kira-kira begitu, Pak Saudara Menteri. Tolong diperhatikan ini.

Cukup ya, Kawan-Kawan? Biar kita masuk kesimpulan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terakhir, Pak Jun.

Pak Ketua, satu saja. 1 menit, 2 menitlah.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Sebentar, Pak. Dari kanan dulu, Pak.

Silakan. *The first*, ya.

1 menit, Bu. Silakan.

F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):

Ya, terima kasih.

Yang pertama, apresiasi atas Bapak Pimpinan dan juga mitra Komisi II. Yang pertama, apresiasi atas kinerja khususnya adalah penerimaan dan juga realisasi anggaran yang melebihi target. Mudah-mudahan ini bukan karena salah perencanaan, tetapi memang karena kerja yang luar biasa sehingga bisa melampaui target.

Kemudian, pertanyaan saya yang mungkin nanti perlu pendalaman adalah tentang apakah di dalam rancangan kemarin anggaran ini sudah juga termasuk penyelesaian adalah penyelesaian tanah di daerah otonomi baru. Khususnya, di empat provinsi di Papua, yang itu tanahnya kan sebentar lagi harus dibangun infrastruktur di sana. Sehingga, kalau belum selesai ke semuanya, itu kan akan menghambat.

Kemudian yang keempat, digitalisasi pertanahan yang akan direncanakan 2025. Ini di samping perlu pelatihan secara teknis, juga kan nanti dalam untuk pemahamannya, kan kepada masyarakat juga perlu ada sosialisasi. Mestinya betul harusnya 2024 ini ada penambah, usulan tambahan untuk sosialisasi terhadap akan diberlakukannya nanti digitalisasi pertanahan. Sehingga, harus ada tambahan itu. Tetapi, istilahnya nanti 2025 sudah diterapkan, tetapi belum ada sosialisasi. Sehingga, mestinya 2004 sudah ada sosialisasi dulu.

Saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Pak Endro, silakan.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Sedikit saja karena biar masuk ke agenda berikutnya.

Jadi, saya juga baca memang anggarannya memang tidak berubah, begitu. Jadi, mungkin kalau dipaksakan pun juga kita problem APBN-nya juga terbatas, juga di Badan Anggaran.

Jadi begini, jadi mungkin jalan keluarnya dari masalah pentingnya Kementerian ATR/BPN, kaitannya dengan tanah dan juga dengan fasilitas kerjanya, saya pikir Kementerian ATR/BPN perlu cari jalan keluar.

Artinya apa? Dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Itu ada khusus komunikasi yang bagian untuk, apa, *government relation*-lah, istilahnya begitu, Kementerian. Karena apa? Ini kan sebenarnya tidak adil juga. Di daerah itu kan sangat terbantu, sangat terbantukan kehadiran kinerja yang baik dari BPN. Seperti yang tadi dipaparkan, cukup baik. Ini juga menambah, menambah pendapatan asli daerah di kabupaten maupun provinsi. Ini tidak adil kalau BPN juga tidak dapat *reward* gitu loh.

Penyelenggara Pemilu, mau KPU, Bawaslu saja dapat hibah banyak di daerah. Masa BPN yang bekerja untuk menghasilkan uang daerah dengan transaksi yang semakin bagus untuk pertahanan masa iya enggak dapat. Itu kan mungkin problem komunikasi politik saja. Jadi, jalan keluarnya itu. Satu.

Yang kedua, ini kaitannya, ini kan masih pendahuluan. Saya ingin supaya seperti pertemuan rapat yang terdahulu itu. BPN kan punya Sekolah Tinggi Pertanahan. Ini juga mohon, ini untuk memacu kinerja ke depan. Ini sekolah ini minta dibantu lebih baik lagi. Kalau perlu, memang yang tadinya non-kedinasan itu dorong. Bisa, bisakah menjadi sekolah kedinasan? Apa yang menjadi hambatan dan sebagainya? Saya pikir ini dari tahun ke tahun itu animo dari Sekolah Tinggi Pertanahan yang di Jogja itu cukup tinggi. Jadi, ini juga mendukung sumber daya manusianya dari BPN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Terima kasih, Pak Endro.

Masih ada? Pak Hugua.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Terima kasih, Pimpinan.

**Rekan-rekan Anggota,
Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Pak Wamen dan seluruh jajaran ATR/BPN,**

Pertama, Pak Menteri, dengan pengantar tadi, dengan realisasi data 100%, saya apresiasi. Karena, saya kira memang harus akui bahwa tim Bapak di daerah sampai di kabupaten cukup *solid* dan matang. Berbahagialah Pak-Pak Menteri mempunyai tim yang cukup kuat sehingga ini tidak muluk sebetulnya.

Oleh karenanya, maka dengan penurunan anggaran ini sebetulnya saya juga kurang terlalu *happy* sebetulnya. Harusnya meningkat karena memang masalah pertanahan ini kan masalah pelik dan salah satu unsur negara sebetulnya, yaitu masalah wilayah. Jadi, saya kira sepantasnyalah ini memang harus naik.

Namun demikian, di tengah-tengah keterbatasan anggaran ini, maka saya minta untuk Sulawesi Tenggara Pak, itu. Di Pulau Wawonii, saya enggak *ngerti*, Pak Sekjen Suyus, apakah sudah dibangun belum? Di Pulau Wawonii, di Kabupaten Konawe Kepulauan. Itu pulau sendiri yang saya cek kemarin belum ada kantornya. Di Boton Selatan saya dengar katanya sudah dibangun. Di Muna Barat saya sudah dengar sudah dibangun, tapi belum selesai saya kunjung ke sana. Hanya atensi saja.

Jadi, kantor ini memang, Pak Menteri saya pernah berkunjung, memang tim kita kadang-kadang mereka menambah-nambah dengan tambahan-tambahan bangunan di belakang. Karena, masih *ngontrak* dengan seng, dan seterusnya. Saya melihat kerja keras mereka begitu hebatnya keluar-masuk hutan. Tapi, kantor memang menjadi penting sekali. Saya bahagia sekali kalau sudah dibangun di beberapa kabupaten pemekaran.

Yang kedua, Pak Menteri yang menjadi atensi saya tanah juga, terutama di IKN. Saya lihat di anggaran ini program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ini sedikit turun sampai 5 miliar di pagu indikatif, 2 miliar di pagu indikatif. Ini saya agak prihatin juga berkaitan dengan pengadaan tanah di IKN, terutama karena itu ini Ibu Kota Negara. Jadi, saya kira mohon diatensi ini, Pak Menteri, termasuk Pak Wamen juga sebagai Wakil IKN. Bagaiman di sana ini menjadi strategis. Jangan sampai turun anggaran ini lalu berpengaruh kepada IKN ini.

Yang ketiga, saya ada bayangan begini, Pak Menteri. Saya bahagia ini anggaran berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, Pak Dirjen baru. Karena ini yang harus segera, kalau boleh di dalam tahun ini, betul-betul *clear* ini. Pak Menteri, di beberapa provinsi saya pun baru, enggak tahu, baru berapa provinsi yang punya RT/RW. Apalagi, RT/RD di tingkat kabupaten. Walaupun itu Perkada, tetapi ini masih ada hambatan.

Nah, Pak Dirjen baru, saya minta atensi khusus ini. Anggaran naik sedikit dari 112 ke 143 ini ya, bahagia sekali saya. Namun Pak Menteri, kalau boleh juga Pak Dirjen Suyus, itu kabupaten lengkap itu ditambah definisinya sedikit. Harus RT/RW-nya atau RD-nya selesai, disyaratkan. Jadi, semua kabupaten lengkap PTSL-nya itu ditambah satu syarat, dia harus RT/RW-nya atau RT/RD-nya itu selesai. Sehingga, ke depan Kabupaten Lengkap itu dilengkapi dengan RT/RW. Karena ini kalau tidak selesai, kita khawatir pembangunan berjalan terus RT/RW-nya baru hadir.

Bahkan saya punya mimpi yang terlalu jauh. Kalau bisa juga pengadaan tanah untuk *subway*, jalan kereta di bawah tanah itu, sudah di pengadaan dari sekarang. Mulai dirancang dari sekarang karena kebanyakan kota-kota kita setelah jadi *slums*, baru dicari tanahnya. Padahal dalam jangka panjang, kereta

keliling kota itu saya punya mimpi 100 tahun kemudian barangkali sudah ada semua itu. Tapi pengadaan tanahnya telat, itu menjadi ruwet pada generasi kita ke depan.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Gaus.

Eh, Pak Gaus lagi. Saya sayang betul dengan Pak Gaus ini.

Maaf, Pak Hugua. Cukup ya?

F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

1 menit. 1 menit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Oh, silakan.

F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota,
Pak Menteri bersama jajaran,**

Anggota sudah berdiskusi panjang lebar tentang alokasi anggaran yang turun.

Pertanyaan saya, program strategis nasional tentang PTSL ini target 2025 sudah tercapai belum? Kalau dengan anggaran ini belum tercapai, seharusnya ini harus di-*planning* ulang. Karena, Pak Jokowi sudah memberikan konfirmasi kepada publik bahwa 2025 tuntas PTSL.

Yang kedua, kaitan dengan tata ruang. Kalau kaitan dengan program tata ruang ini alokasi anggarannya juga belum proporsional, menurut saya *sih*, itu harus di-*review*. Bagaimana perencanaan ke depan, ketika kita pendalaman, proporsi itu sudah tergambar secara konkrit.

Saya kira ini, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Sudah, Pak Amin?

Enggak, Ketua Banggar telepon saya. Ternyata, beliau monitor juga rapat ini.

Saudara Menteri melalui Pak Sekjen, tolong dijelaskan atau diingatkan ke kami di halaman berapa penambahan anggaran, Pak. Coba dijelaskan melalui Pak Sekjen mungkin kalau itu.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN
NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO,
M.Sc., M.P.A., M.A.):**

Bisa ditampilkan yang Lampiran Perbandingan Usulan Pagu Dan Pagu Indikatif ATR/BPN 2023 hingga 2025? Tolong ditampilkan.

Siapa operatornya?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Iya, silakan Pak Menteri. Kita punya ininya ya, Pak.

Ada paling belakang, Pak.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN
NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO,
M.Sc., M.P.A., M.A.):**

Tolong ditampilkan.

Bukan, bukan, biar jelas semuanya.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Terima kasih sekali Bapak Pimpinan yang semua tadi menyampaikan keprihatinannya sebetulnya agar Kementerian ATR/BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan.

Benar.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini. Tetapi, bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga 14 triliun. Sekali lagi, kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya 6,5 triliun. Jadi, kalau sebetulnya kebutuhannya seperti ini.

Kalaupun tidak, kalaupun tidak Bapak Pimpinan, kami berharap ya tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau 2023. Kalau tahun lalu 7,2 triliun dan kita pada saat ini juga setengah mengajukan permohonan tambahan, anggaran tambahan itu, sekitar 620 miliar. Artinya, kalau ditambahkan kurang lebih 7,8 atau hingga 8 triliun. Itu saja sudah sangat-sangat berarti.

Dan karena memang kami mendapatkan ini, mungkin salah kami tidak menyampaikan secara gamblang karena kesungkunan tadi. Tetapi, yang jelas kami tidak putus asa dalam arti dengan yang kami dapatkan alokasi tersebut kami juga tengah berusaha, Bapak/Ibu sekalian, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari bank dunia. Inilah mengapa, nanti di bagian kedua sebetulnya kami ingin melaporkan, mengapa ketika itu kami juga serius untuk menghadiri undangan bank dunia sekaligus juga bermohon, bernegosiasi, semoga kita bisa mendapatkan pinjaman lunak.

Perlu kami laporkan, untuk lima tahun terakhir Kementerian ATR/BPN mendapatkan pinjaman sekitar 200 juta US *Dollar* untuk lima tahun. Dan dari diskusi kami dengan *country director* di Indonesia, contohnya. Dan juga mereka mengapresiasi kemajuan PTSL termasuk program-program reforma agraria lainnya, kami sedang membahas kemungkinan bisa mendapatkan tambahan hampir hingga 600 juta US *Dollar*. Artinya, penambahan tiga kali lipat dari bantuan ataupun, mohon maaf, pinjaman lunak lima tahun sebelumnya untuk lima tahun ke depan. Tapi, kami belum berani untuk menyampaikan ini di forum karena masih dalam proses negosiasi.

Kami mohon doa dan supportnya dari Bapak-Bapak/Ibu sekalian. Karena, mudah-mudahan ini juga cukup berarti untuk menanggulangi defisit, dalam arti kekurangan atau kebutuhan anggaran yang sebetulnya kami ajukan di tahun 2025.

Bisa dilihat, Bapak/Ibu sekalian, di *slide* yang sederhana ini. Jadi, kalau kami jabarkan sebetulnya ini Bapak/Ibu, kekurangannya. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan atensi juga untuk tahun depan. Sehingga, tadi ada, Bapak/Ibu menyampaikan, *concern* terkait dengan kondisi kantor. Benar sekali.

Dan saya terima kasih juga masukannya. Barangkali, kami masih belum optimal berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Mudah-mudahan mendapatkan atensi juga. Karena memang benar kantor pertanahan ini,

terutama ruang-ruang warkahnya dan lain sebagainya, itu sudah tidak ideal lagi.

Saya kalau, memang betul Pak, belum-belum semuanya, tapi paling tidak saya sudah punya *sampling* beberapa Kantah dan Kanwil yang memang sangat terbatas ruang yang dimiliki kendati semangat kita adalah melakukan transformasi digital. Tetapi, paling tidak harus ada kecukupan ruang dan juga keamanan. Paling tidak dari kemungkinan rusak, hilang ataupun disalahgunakan.

Bapak/Ibu,

Untuk yang terkait dengan PTSL ini, juga memang kami sedang berupaya untuk mengejar agar jika mendapatkan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan ini bisa *goal* di pertengahan tahun ini. Maka, target 120 juta bidang tanah, *insya Allah*, dapat tercapai akhir tahun ini. Tapi, untuk mencapai 126 juta bidang tanah di tahun depan. Dan kami juga mendapatkan laporan ataupun *update* bahwa itu target awal dari tahun 2017 pertama kali dicanangkan PTSL. Tetapi tentu dalam perjalanannya, bidang-bidang tanah itu juga berkembang lagi, pecah-pecah lagi. Jadi, pasti ini akan terus menjadi pekerjaan kami dan tentunya membutuhkan dukungan anggaran.

Terkait dengan modernisasi alat termasuk juga maksud saya, alat pengukuran, *survei*, dan lain sebagainya, ini juga kami sedang upayakan untuk terus dimodernisasi walaupun tentunya masih perlu dukungan yang cukup besar.

Ini juga tadi, terima kasih Bapak/Ibu, tadi sudah mengingatkan dan memberikan *concern*-nya. Mudah-mudahan dapat dilakukan secara bertahap. Dan mudah-mudahan ada progres yang bisa kami laporkan di kemudian hari terkait dengan pembangunan, dan rehabilitasi kantor-kantor pertanahan, maupun juga modernisasi alat survei dan pengukuran.

Selebihnya, kami mungkin mohon waktu, Bapak Pimpinan, jika untuk bisa menjabarkan secara lebih elaboratif terkait mata anggaran atau elemen-elemen utama yang perlu kami minta atau ajukan tambahannya. Tapi, paling tidak singkat kami sampaikan:

- dukungan manajemen sekitar 1,34 triliun;
- program pengelolaan dan pelayanan pertanahan ini 5,98 triliun; dan
- penataan ruang 0,258 triliun.

Tapi, tadi juga terima kasih Bapak *concern* yang luar biasa. Kami terharu ketika para wakil rakyat memperhatikan kehidupan dan juga nasib dari para pegawai BPN yang sering kali terjerat hukum. Sehingga, dukungan advokasi pembelaan ini juga menjadi *concern*. Dan kami juga berharap ada tambahan anggaran di situ. Dan termasuk juga tentang kesejahteraan para pegawai yang sudah bekerja keras. Paling tidak, ada semacam *reward* dan juga perhatian terhadap fasilitas dan sarana kerja yang mereka miliki di kantor-kantor pertanahan, termasuk di daerah-daerah pengembangan, pengembangan baru atau pemekaran baru.

Demikian respons yang dapat saya sampaikan, Bapak Pimpinan, terkait dengan isu di bidang anggaran maupun penambahan anggaran yang belum terjelaskan dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya. Terima kasih, Saudara Menteri.

Satu yang terlupa Pak, honorer. ATR/BPN itu honorernya ribuan, Pak. Jadi, kalau kita ke daerah mereka sudah tahu kalau kita yang datang langsung, "Pak saya honorer". Ini tolong diperhatikan juga, Pak. Ribuan mereka Pak, di sana. Kalau sampai mereka berhenti, maka stagnanlah ATR/BPN ini Pak, Pak Sekjen.

Baik, kita langsung ke kesimpulan. Setelah itu, kita masuk ke RDP.

Ya, Bu Rezka. Sudah boleh, Bu Rezka? Ya.

Saya izin Bu Rezka saja, Saudara Menteri.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi-

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan. Pimpinan.

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan, Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Jadi sebelum disimpulkan, tadi kawan-kawan kan sudah mendorong kepada Pak Menteri. Bahwa Pak Menteri ternyata belum atau tidak meminta tambahan anggaran.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ada tambahan Pak, ini.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak, tunggu dulu. Saya tahu. Saya kronologis bicara, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Silakan. Silakan, Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ternyata yang diajukan oleh Menteri kepada Bappenas dan *anu* jumlahnya 14, 14 T dari 6,4 yang direkomendasikan. Oleh karena itu, sikap kita dalam hal ini bagaimana? Karena banyak persoalan-persoalan yang dibutuhkan dana oleh Pak Menteri ATR/BPN itu.

Kira-kira berapa kita masukkan sebagai kesimpulan tambahan anggaran untuk Kementerian ATR/BPN ini?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, tetap usulannya, Pak. 14 kalau saya, Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Hah?

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Tetap 14.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

14. Oke.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

14, Pak. Itu kan, pagu indikatif itu kan 6,4 sekian. Usulan 14. Ya, tetap 14, Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, Saudara Menteri setuju kan?

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.):

Siap, setuju.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Nanti di sini ada orang Banggar, Pak Cornelis, Pak, Pak Agung. Ada empat atau lima orang di sini, Pak. Nanti Pak Sekjen bisa komunikasi dengan kawan-kawan di sini.

Nah, itu Pak Cornelis, Pak. Presiden Dayak sedunia. Sudah pernah lurah, sudah pernah camat, sudah pernah bupati, sudah pernah gubernur dan sekarang DPR RI.

Baik, cukup ya.

KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional sebagai berikut:
 - a. Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp7.874.964.280.962,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp8.072.163.385.000,00 atau sebesar 97,56%.

Setuju ya, Saudara Menteri?

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.):

Siap, setuju.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

(RAPAT: SETUJU)

- b. Realisasi APBN tahun 2024 (per Mei 2023) sebesar Rp2.379.881.308.201,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.607.171.296.000,00 atau sebesar 31,28%.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Koreksi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Ya, silakan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Per Mei 2024, barangkali.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.):

Mei 2024. Iya, iya.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):

Iya sengaja, Pak.

Biar Bapak dari Demokrat menyuarakan tahun ini, Pak. Jadi, Pak Ongku kedengaran.

2024

Cocok, Pak Ongku?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN tahun 2025 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp6.454.781.052.000,00 dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 untuk selanjutnya.

Setuju?

Pak Wahyu setuju *nih*? Setuju ya. Iya silakan.

Iya?

Ya, tinggal diketik ulang, Pak. Enggak ada masalah ini, Pak.

Pada Raker ya? Pada rapat pembahasan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Cukup itu, Ketua, menurut saya. Karena, nanti kan ada Raker, ada RDP-nya pada saat kita konsiyering. Sudah benar itu bahasanya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ya. Setuju ya?

Setuju nomor "2. ...pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 untuk selanjutnya."

(RAPAT: SETUJU)

2. Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.586.538.037.000,00 Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang.

Setuju ya? Jadi, tetap nanti kita kembali ke 14, Pak.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PPERTANAHAN
NASIONAL RI (Mayor Inf. (Purn.) H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO,
M.Sc., M.P.A., M.A.):**

Iya, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan, dikenal dengan satuan tiga, serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2025 yang akan datang.

Setuju?

ANGGOTA RAPAT:

Sampai satuan tiga?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ya?

ANGGOTA RAPAT:

Sampai satuan tiga?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Ya, kita meminta, Pak.

Kalau diberikan, *monggo*. Tak diberikan juga *ora opo-opo*.

ANGGOTA RAPAT:

Siap.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI/F-PDIP):**

Begitu, Pak. Kan meminta kita, Pak.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian hasil rapat kita dalam bentuk kesimpulan pada hari ini, Selasa,
11 Juni 2024.

Terima kasih kepada Saudara Menteri dan jajarannya.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002

